KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) FAX. (021) 7980655, 7949770

RUMUSAN HASIL
RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MAKASSAR, 7 - 9 FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Februari 2019 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema "**Dukcapil Go-Digital, Sukses Pemilu 2019**", diikuti oleh Kepala Biro/Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang bertujuan untuk :

1. Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Dukcapil Go Digital;
2. Mendorong tuntas perekaman KTP-el bagi Penduduk wajib KTP di seluruh Indonesia;
3. Memantapkan tata kelola pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital.

II. HASIL RAKORNAS

Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, presentasi Narasumber dan diskusi yang berlangsung, serta hal-hal mendasar yang disampaikan dan dibahas dalam Rakornas, maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

A. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PEMILU 2019)

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan penyelesaian perekaman serta pencetakan KTP-el;
2. Dalam kerangka menyukseskan Pemilu 2019, akan dilakukan percepatan pencetakan KTP-el melalui mekanisme pencetakan dengan mesin cetak

yang disediakan di Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencetakan akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, menggunakan dana APBN yang dialokasikan dalam DAK. Ketersediaan blangko sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 tanggal 17 April 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan membantu apabila ada kendala atau diperlukan pengecekan data yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu.

B. CAPAIAN DITJEN. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Dari 14 langkah besar capaian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dipastikan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakannya.
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan lompatan besar, Go Digital dengan sarana, material dan SDM yang bekerja sangat baik, membangun Indonesia yang jauh lebih baik dalam sistem digital.
3. Dengan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, maka akan membawa implikasi yang sangat besar yaitu pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang murah, mudah dan cepat. Dalam prakteknya maka digitalisasi akan menuju pelayanan yang *timeless, borderless* dan *paperless*.
4. Jemput bola yang dilakukan secara gotong royong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di 5 (lima) provinsi yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat telah berjalan dengan baik.
5. Program selanjutnya adalah Dukcapil Goes to Campus dan Dukcapil Goes to School, jemput bola percepatan perekaman akan dilakukan di sekolah-sekolah sebagai tindakan affirmatif perekaman bagi penduduk pemula.
6. Pemutakhiran berkelanjutan agar terus dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota. Terkait dengan pemutakhiran data oleh KPU, agar hanya diberikan NIK dan nama saja, kemudian KPU akan melakukan pemutakhiran melalui mekanisme akses data.
7. Sebagai upaya meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang professional dan berintegritas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Institut Pemerintahan

Dalam Negeri telah mendirikan Program Diploma IV Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Akan segera dilaksanakan pengangkatan pejabat fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK melalui *Inpassing,* oleh karena itu paling lambat tanggal 15 Februari 2019 data ADB Kependudukan dan Operator SIAK sudah dapat kami terima.
9. Terus mendorong terciptanya ekosistem kependudukan, dimana data dan Dokumen Kependudukan digunakan untuk semua keperluan akses layanan publik.

C. DUKCAPIL GO DIGITAL

1. Dalam rangka memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan aman, maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota terus meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan inovasi yang berbasis teknologi digital. Seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaaten/Kota menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) untuk menerbitkan dokumen akta kelahiran, akta Kematian, surat keterangan pindah datang, dan kartu keluarga mulai tahun 2019.
2. Untuk menciptakan budaya baru dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu pola pikir dan cara kerja serba digital, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan lompatan besar, yaitu Dukcapil Go Digital.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, merupakan landasan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pengembangan system administrasi kependudukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring.
4. Pelaksanaan Go Digital juga dilakukan untuk Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten /kota, yaitu proses pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Dukcapil Daerah akan dilaksanakan secara online.

III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh,

Makassar, 8 Februari 2019

Wakil Pemerintah Pusat

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH

Wakil Pemerintah Provinsi

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara

Dr.Drs.M.Ismael P.Sinaga,M.Si

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Maluku
Utara

H. Adam Karim, S.IP

Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Samarinda

M. Abdullah, SH., M.Psi

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Bulukumba

Dra. A. Mulyati Nur, M.Pd